

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat UUD RI tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dari waktu ke waktu.

Sebagaimana diketahui, konsep dasar otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Dengan kewenangannya, daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi, dan pembangunan daerah.

Diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Diharapkan pemerintah daerah mampu mendorong upaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efektif dan efisien (Nordiawan dan Ayuningtyas 2010:25).

Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, maupun pendapatan asli daerah. Dana

perimbangan merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendanaan yang bersumber dari daerah. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana keseimbangan kepada pemerintah daerah.

Menurut penelitian Prakosa (2004), transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah.

Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembelanjaan daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat (Kuncoro, 2009:371).

Penelitian Nugraeni (2011) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan pemerintah daerah dalam menyusun APBD masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara Spesifik Nugraeni menegaskan bahwa dari ketiga variabel tersebut yang paling kuat hubungannya dengan belanja daerah adalah DAU.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (16) belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota. Hubungan dalam

bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

DAU adalah salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah karena kemampuan setiap daerah berbeda-beda. Pemberian DAU diprioritaskan pada daerah yang pendapatan fiskalnya rendah, sehingga pada pemerintah daerah yang pendapatan fiskalnya tinggi akan mendapatkan bagian transfer yang lebih rendah.

Dalam mengelola keuangannya, seharusnya pemerintah daerah meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan mengoptimalkan potensi, kreatifitas, dan kemampuan daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan pembangunan daerah secara mandiri sehingga tidak menggantungkan dana dari pemerintah pusat.

Dengan adanya peningkatan PAD, masyarakat berharap adanya peningkatan pelayanan terutama di sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah. Harapan ini bisa terwujud apabila ada upaya dari pemerintah memberikan fasilitas pendukung investasi. Pemerintah perlu memberikan alokasi belanja daerah yang lebih besar untuk hal itu. Apabila investor mau menanamkan modalnya di kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah akan meningkat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Yansen (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian sebelumnya menggunakan variabel DAU, PAD, dan belanja daerah, serta penelitian dilakukan di kabupaten/kota wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2011 dan 2012, sedangkan penelitian ini terdapat penambahan variabel yaitu DAK, serta penelitian dilakukan di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah pada tahun 2012-2014.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA WILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2012-2014).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu mengenai permasalahan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh DAU terhadap belanja daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh DAK terhadap belanja daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah?

3. Apakah terdapat pengaruh PAD terhadap belanja daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah?

C. **Tujuan**

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap belanja daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap belanja daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.
3. Untuk Menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.

D. **Manfaat Penelitian**

Apabila seseorang peneliti telah selesai melakukan penelitian dan memperoleh hasil, maka diharapkan dapat menyumbangkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat, atau khususnya kepada bidang yang diteliti. Oleh karena itu, melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dicapai beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khasanah dunia pustaka bagi pembaca.
 - b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu akuntansi sektor publik, sehingga dapat mengetahui pentingnya pemanfaatan DAU, DAK, dan PAD terhadap belanja daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi kantor pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembelanjaan daerah.
- b. Dapat dimanfaatkan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu untuk kemajuan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika penulisan yang baik, teratur, dan terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, mencantumkan secara urut dari bab ke bab. Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian, yang meliputi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan definisi otonomi daerah, APBD, PAD, DAU, DAK, belanja daerah, pembiayaan daerah, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel dan pengukurannya, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan analisis data, temuan empiris yang diperoleh penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan berguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya.